BAB IV

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DI BAZNAS KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Terhadap Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik

Penetapan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dapat dipandang sebagai langkah awal dalam integrasi zakat dan pajak. Zakat dapat terakomodasi dalam hukum positif. Pemerintah mengatur kaitan antara zakat yang dibayarkan masyarakat sebagai pelaksanaan kewajiban beragama dengan pajak yang dibayarkan kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara.

Bahkan dalam buku Pajak itu Zakat, Masdar Farid Mas'udi mengungkapkan bahwa pemisahan lembaga zakat dan pajak adalah sesuatu yang sesat dan menyesatkan karena konsep pajak merupakan konsep zakat, zakat sebagai ruhnya dan pajak sebagai badannya.[1] Masdar melihat zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang bisa disatukan meski berangkat dari akar kewajiban yang oleh ulama konvensional dibedakan. Dengan menggabungkan atau menyatukan pajak dan zakat, berarti seorang muslim yang membayar pajak (dengan spirit dan niat zakat) kepada pemerintah, maka gugurlah kewajiban agamanya.

[1] Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung:PT Mizan Pustaka, 2010), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tersebut dapat dijadikan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan zakat dan pajak di Indonesia. Memang gaya pemikirannya yang terkadang ekstrim dan ganjal, namun sangat mengedepankan kemaslahatan umat, termasuk pemikirannya mengenai integrasi zakat dan pajak. Adanya dua kewajiban yaitu membayar zakat dan pajak merupakan beban ganda yang memberatkan umat Islam.

Langkah pemerintah dalam menetapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat dianggap sebagai langkah yang tepat. Meskipun zakat yang dibayarkan *muzakki* tidak mengurangi pajak secara langsung, melainkan mengurangi penghasilan bruto, namun regulasi ini memberikan nafas lega bagi *muzakki* yang *nota bene*nya juga menjadi wajib pajak. Beban mereka ketika harus membayar kewajiban zakat dan pajak akan lebih ringan.

Ketika pemerintah telah menghasilkan regulasi yang bagus, kemudian langkah selanjutnya yaitu implementasinya, implementasi suatu regulasi atau kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menempatkan BAZNAS sebagai pencetak Bukti Setor Zakat (BSZ). jika *muzakki* menghendaki zakat yang telah dia bayarkan dapat mengurang penghasilan kena pajak, maka dia harus menyertakan BSZ saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak.

Dalam prakteknya, BAZNAS Kabupaten Gresik telah mencetak Bukti Setor Zakat (BSZ) yang sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak. Mekanisme pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak juga sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak yang berlaku. *Muzakki* yang menyertakan fotokopi Bukti Setor Zakat ketika pelaporan SPT Tahunan pajak di KPP Pratama Gresik penghasilan bruto atau penghasilan kena pajaknya telah terkurangi dengan zakat yang telah dibayarkannya. Ini menunjukkan bahwa tujuan dari implementasi regulasi ini telah tercapai, yaitu meringankan beban *muzakki* yang harus membayar zakat dan pajak.

Peran BAZNAS Kabupaten Gresik dan BAZNAS lainnya dalam regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak hanya sebatas mencetak Bukti Setor Zakat. Oleh karena itu fungsi *controlling* dalam implementasi regulasi ini kurang terlihat, tetapi BAZNAS akan selalu memberikan informasi kepada *muzakki* ketika pengurus BAZNAS memberikan Bukti Setor Zakat. Pihak BAZNAS telah berusaha agar regulasi ini dapat diterapkan. Wajib pajak yang rasional tentu akan menyertakan Bukti Setor Zakat pada saat pelaporan SPT tahunan pajak, karena manfaatnya akan kembali kepada mereka sendiri meskipun pengurangan tersebut menurut pandangan orang tidak begitu signifikan, namun dengan memanfaatkan pengurangan tersebut berarti wajib pajak turut serta mengimplementasikan regulasi yang ada. Karena tanpa adanya implementasi, regulasi yang sangat baik tersebut akan sia-sia.

Menurut Didin Hafidhuddin adanya sinergi dan integrasi zakat pada kebijakan fiskal, maka akan ada sejumlah manfaat yang didapat yaitu perluasan basis *muzakki* dan wajib pajak, serta membantu meringankan beban APBN dalam hal anggaran pengentasan kemiskinan. Melalui kordinasi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik antara otoritas zakat dan pajak, maka identifikasi wajib pajak dan *muzakki* akan semakin luas sehingga diharapkan penerimaan zakat dan pajak akan semakin meningkat.[2]

Dalam data penerimaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Gresik yang ada di bab ketiga, dari tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu semenjak diterapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terjadi peningkatan. Pengumpulan zakat 2013 adalah Rp. 1.980.412.882 dan di tahun 2014 mengumpulkan Rp. 2.631.784.738. Namun regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan ini bukan menjadi satu-satunya faktor peningkatan pengumpulan zakat jika melihat tren pengumpulan zakat selama lima tahun terakhir. Untuk mengetahui faktor–faktor yang menjadikan peningkatan begitu signifikan baik itu sebelum maupun setelah regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak diterapkan, diperlukan penelitian lebih lanjut sebab penelitian ini hanya sebatas mengetahui efektifitas implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

B. Analisis Terhadap Efektifitas Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik

Meskipun implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik masih memasuki tahun kedua, namun sudah efektif. Hal ini, dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu adanya kordinasi dan komunikasi yang baik antara BAZNAS dan KPP Pratama

[2] Zusiana Elly Trianti, "Integrasi Hukum Pajak dan Zakat di Indonesia", *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Nomor 2 Volume 23 (Oktober, 2013), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gresik, sarana dan fasilitas sudah mendukung, dan sosialisasi intensif yang dilakukan oleh BAZNAS.

a. Adanya kordinasi dan komunikasi yang baik antara BAZNAS dan KPP Pratama Gresik

Suatu kebijakan tidak akan berjalan jika tidak ada sinergi antar otoritas yang bersangkutan, hal inilah yang menjadikan regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kabupaten Gresik belum terlaksana di Kabupaten Gresik sejak diberlakukan tahun 2001. Namun, mulai awal 2014 kemarin, telah terjalin kordinasi dan komunikasi yang baik antara BAZNAS Kabupaten Gresik dan KPP Pratama Gresik. Kedua institusi terebut juga telah bersama-sama melakukan sosialisasi, hal ini mengindikasikan sinergi yang baik antara BAZNAS Kabupaten Gresik.

Bukti Setor Zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik menurut pegawai KPP Pratama sudah dapat dikatakan sebagai bukti yang sah dan valid karena sudah memenuhi persyaratan-persyaratannya yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Di dalam peraturan Dirjen Pajak tersebut diterangkan bahwa BSZ yang bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto paling sedikit harus memuat:

1) Nama lengkap Wajip Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jumlah pembayaran.
3) Tanggal pembayaran.
4) Nama badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.
5) Tanda tangan petugas badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.
6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila melalui transfer rekening bank.

Bukti Setor Zakat dari BAZNAS Kabupaten Gresik termasuk bukti pembayaran langsung yang sudah memenuhi persyaratan-pesyaratan di atas kecuali persyaratan yang keenam. Persyaratan keenam hanya untuk bukti pembayaran melalui transfer rekening bank. Dari data yang diperoleh penulis, *muzakki* yang terdiri dari wajib pajak badan yaitu PT Gresik Migas dan tiga orang wajib pajak orang pribadi yang telah menyertakan Bukti Setor Zakat, penghasilan kena pajaknya telah terkurangi dengan sejumlah zakat yang mereka bayarkan.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Faktor sarana dan fasilitas penunjang juga penting dalam pelaksanaan suatu regulasi. Dalam regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini, peran BAZNAS Kabupaten Gresik adalah megeluarkan Bukti Setor Zakat (BSZ). Untuk memaksimalkan perannya ini BAZNAS Kabupaten Gresik menggunakan bantuan aplikasi SIMBA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aplikasi yang dibuat untuk manajemen informasi zakat ini mempunyai banyak fitur, salah satunya yaitu mencetak Bukti Setor Zakat.

SIMBA sebenarnya telah didesain dengan baik, sehingga seluruh laporan keuangan zakat telah memenuhi standar akuntansi yang diperlukan, termasuk Bukti Setor Zakat yang dicetak telah memenuhi Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Mencetak BSZ melalui aplikasi SIMBA ini sangat mudah yaitu hanya memastikan komputer telah tersambung jaringan internet dan komputer telah terhubung dengan mesin printer, kemudian dalam apliksi SIMBA hanya memilih *muzakki* pada daftar *muzakki* kemudian memilih menu cetak Bukti Setor Zakat. Setelah *print out* BSZ keluar, pengurus hanya perlu menammbahkan tanda tangan dan stempel BAZNAS Kabupaten Gresik. Kemudahan mencetak Bukti Setor Zakat tersebut telah diakui oleh beberapa pengurus BAZNAS Kabupaten Gresik yaitu Nasichun Amin, Mursyid, A. Khusnun Ridlo. Mereka sangat terbantu dengan adanya aplikasi SIMBA. Mencetak BSZ lebih mudah, sebelum adanya SIMBA, mereka harus mengetik manual setiap item yang ada di format BSZ pada Microsoft exel.

Penggunaan aplikasi SIMBA dalam manajemen informasi zakat tepat sekali karena memberikan kemudahan, termasuk mencetak Bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setor Zakat. Dalam kaitannya dengan regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, pengguanaan aplikasi SIMBA hanya dalam ruang lingkup BAZNAS saja, *muzakki* yang menghendaki pengurangan penghasilan kena pajak harus menyertakan Bukti Setor Zakat tersebut saat pelaporan SPT Tahunan pajak. Dirjen Pajak juga mempunyai aplikasi e-*Filling* yang memberikan masyarakat kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan pajak dengan cara online. Namun penggunaannya hanya sebatas pada perpajakan saja. Inilah yang diharapkan adanya aplikasi yang terintegrasi antara BAZNAS dan otoritas pajak di kemudian hari, sehingga *muzakki* yang *notabene* wajib pajak ketika telah membayarkan zakat pada BAZNAS maka muncul notifikasi dan secara otomatis nominal zakat yang dibayarkan telah termuat di dalam SPT Tahunan pajak.

c. Sosialisasi Intensif BAZNAS Kabupaten Gresik

Regulasi tidak akan berjalan jika tidak ada sosialisasi. Masyarakat akan mengetahui adanya suatu regulasi, kebijakan atau hukum jika telah mendapatkan informasi dari regulator, penegak hukum, atau pelaksana. Untuk itu, BAZNAS Kabupaten Gresik melakukan sejumlah sosialisasi agar masyarakat lebih memahami tentang regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak khususnya di Kabupaten Gresik. Dari sosialisasi yang sudah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik, baik itu dilakukan secara langsung atau lewat perantara media, dapat dikatakan sudah baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sosialisasi langsung yang juga berkordinasi dengan KPP Pratama memberikan penegasan terbentuknya kordinasi yang baik antara BAZNAS dan KPP sehingga dapat menumbuhkan keyakinan masyarakat untuk membayar zakat pada BAZNAS dan kesadaran membayar pajak. informasi yang diserap oleh masyarakat akan lebih jelas karena ada interaksi langsung antara BAZNAS dan masyarakat. Hanya saja, sosialisasi langsung ini terbatas, belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten Gresik, apalagi daerah yang jaraknya jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Gresik, untuk itu perlu peningkatan lagi agar masyarakat umum paham akan regulasi ini beserta mekanismenya. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan memaksimalkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di seluruh Kabupaten Gresik.

Sosialisasi lewat media juga dilakukan BAZNAS Kabupaten Gresik dengan baik, mulai dari memasang spanduk di sisi timur jalan masuk kantor Pemkab, dan beberapa dipinggir jalan-jalan protokol agar setiap masyarakat membayarkan zakat pada BAZNAS dan lebih ringan dalam membayar pajak. Sosialisasi yang dilakukan lewat radio juga tepat, melalui Suara Giri fm, masyarakat yang dalam melakukan aktifitasnya diiringi lagu-lagu dangdut dapat mendapatkan informasi dari BAZNAS Kabupaten Gresik. Terlebih dalam era Global ini, masyarakat yang bisa mengakses jaringan internet akan mendapatkan informasi BAZNAS Kabupaten Gresik dari Website BAZNAS Kabupaten Gresik, dan media Sosial milik BAZNAS Kabupaten Gresik atau bahkan masyarakat akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan informasi tentang regulasi ini dari beberapa website, situs, blog, bahkan media sosial yang membahas seputar zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id